

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah salah satu partai politik tertua di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1973 melalui fusi beberapa partai Islam. Selama hampir lima dekade, PPP telah menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia, dengan basis massa yang solid dan konsisten mengirimkan wakil-wakilnya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga tahun 2019. Namun, Pemilu 2024 menandai titik balik signifikan bagi PPP, di mana partai ini untuk pertama kalinya gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%. PPP hanya berhasil memperoleh 3,87% suara atau sekitar 5.878.777 suara sah pada Pemilu 2024. Angka ini berada di bawah ambang batas parlemen sebesar 4%, sehingga PPP tidak dapat meloloskan wakilnya ke DPR RI. Ini merupakan pencapaian terendah dalam sejarah pemilu PPP. Kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, partai mengalami perpecahan kepemimpinan dan konflik yang mengurangi semangat kerja kader serta menurunkan kepercayaan publik. Pemberhentian Suharso Monoarfa dan konflik di antara elite partai menciptakan citra negatif yang memperlemah posisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain itu, kurangnya konsolidasi dan minimnya kegiatan di tingkat akar rumput menyebabkan partai gagal menggerakkan mesin politiknya secara efektif. Di sisi eksternal, fragmentasi partai-partai Islam dan kemunculan partai-partai baru yang lebih relevan bagi pemilih muda mengakibatkan terpecahnya suara yang tadinya menjadi basis tradisional Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Perubahan demografi pemilih yang didominasi oleh milenial dan Gen Z yang cenderung memilih partai dengan visi modern serta kampanye negatif dari pesaing yang memanfaatkan isu internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga memperburuk situasi. Kegagalan dalam gugatan PPHU di MK yang menolak permohonan terkait dapil Jawa Tengah III dan

suara DPRD Rembang 2 semakin mempertegas posisi PPP di luar parlemen untuk periode 2024-2029.

Kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk konflik kepemimpinan yang berlarut-larut, kurangnya konsolidasi di tingkat akar rumput, serta kesalahan komunikasi yang merusak citra partai. Faktor eksternal meliputi fragmentasi di kalangan partai-partai Islam, munculnya partai-partai baru yang lebih menarik bagi pemilih muda, kampanye hitam, disinformasi, dan ketidakpuasan terhadap pilihan koalisi serta calon presiden yang diusung. Dinamika politik nasional yang tidak mendukung dan perubahan preferensi pemilih Muslim yang lebih terdidik dan pragmatis juga berkontribusi terhadap kegagalan PPP.

Teori komunikasi politik menekankan pentingnya konsolidasi internal dan strategi komunikasi yang efektif untuk membangun citra positif partai di mata publik. Kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 menunjukkan perlunya perbaikan strategi komunikasi politik partai, baik secara internal maupun eksternal, untuk kembali meraih dukungan pemilih. Komunikasi politik yang efektif harus mencakup strategi komprehensif yang memahami preferensi dan perilaku pemilih serta menyesuaikan pesan partai agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Pada penelitian ini kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pemilu 2024 disebabkan oleh ketidakmampuan partai untuk memahami dan merespons perubahan preferensi pemilih muda serta kurangnya konsolidasi internal dan konflik kepemimpinan. Menurut teori komunikasi politik, partai politik harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan politik dan sosial agar tetap relevan. PPP perlu melakukan reformasi signifikan dalam strategi komunikasi politiknya, memperbaiki struktur organisasi internal, meningkatkan konsolidasi di antara kader partai, dan mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menarik pemilih muda dan beradaptasi dengan dinamika politik yang berkembang. Dari analisa yang telah dilakukan menunjukkan bagaimana kegagalan komunikasi

politik, baik internal maupun eksternal, dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kegagalan sebuah partai politik dalam pemilihan umum. Dalam kasus PPP, konflik kepemimpinan, kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah, serta kegagalan dalam memfasilitasi forum publik dan menjaga loyalitas pemilih, semuanya merupakan manifestasi dari komunikasi politik yang tidak efektif. Untuk menghadapi tantangan seperti ini, partai harus memperkuat sistem komunikasi politik mereka, memastikan pesan yang konsisten dan harmonis, serta membangun saluran komunikasi yang efektif di semua tingkatan organisasi.

